

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran bagian dari alat perencanaan-perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat untuk pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan, semua program yang telah direncanakan sangat memerlukan anggaran agar dapat terealisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah .

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian, dengan memanfaatkannya anggaran pendapatan

dan belanja (APBD) menjadikannya jalan pelaksanaan akan jauh nampak lebih bisa terjamin

Dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu pemerintah yang mulai berkembang baik dari segi pembangunan maupun tata kelola pemerintahan. Pada setiap daerah terdapat karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan nomenklatur Dinas tiap daerahnya akan berbeda. Di Kabupaten Bandung sendiri terdapat 16 Dinas dalam pelaksanaan teknis kinerja daerah. Salah satunya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi merupakan penyelenggara pada bidang Statistik di Kabupaten Bekasi yang berbentuk pemerintahan. Dinas ini mengatur penyelenggaraan, pelayanan dan bagaimana cara meningkatkan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan .

Dalam pengelolaan anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan itu menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan ialah serangkaian prosedur manual maupun yang telah terkomputerasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan.

Peran pemerintah dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan

kesejahteraan tidak dapat terpenuhi, terutama dalam mengoptimalkan Penyerapan anggaran yang masih terlihat kurang optimal

Sejauh ini dalam pelaksanaan kegiatan pada BKPPD tidak dapat dihindarkan, dengan ketidaksesuaian penyerapan anggaran antara realisasi dengan anggaran yang telah direncanakan. Meskipun dalam penyusunan perencanaan anggaran BKPPD telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, tapi masih saja belum dikatakan efektif, ini terbukti dari adanya ketidaksesuaian penyerapan anggaran antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran, yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 258/PMK.02/2015 Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa penyerapan anggaran paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen). Presentasi realisasi capaian *output* paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen) dan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dalam realisasinya masih banyak terdapat Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyerapan anggarannya belum maksimal menyebabkan kurang optimalnya kinerja pemerintah. Disisi lain penyerapan anggaran merupakan suatu hal yang vital guna mendorong proses pembangunan sumber daya yang dapat membangun kinerja pemerintah secara lancar. Kegagalan target penyerapan anggaran ini menyebabkan hilangnya manfaat belanja, karna semua yang dialokasikan tidak dapat semuanya dimanfaatkan dengan baik. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. (Cardisiawan, 2009)

Berkaitan dari apa yang telah dijelaskan dengan hal tersebut Badan Pusat Statistik kabupaten. Bekasi pada Anggaran Belanja langsung masih terdapat belum terealisasi dengan maksimal 100%, serta terdapat naik turunnya presentase dimana realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai berbanding anggaran Langsung Dinas Pendidikan Kota Bandung serta realisasinya pada Tahun Anggaran 2015-2017 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2015	13.223.860.000	9.388.403.149	71,00
2	2016	34.262.748.000	31.932.417.831	93,22
3	2017	8.580.590.000	7.294.136.967	85,01

Sumber : LAKIP Tahun 2015-2017

Tabel 1.1 merupakan data penyerapan anggaran belanja langsung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi dari mulai tahun 2015–2017, terlihat pada tahun 2016 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hampir mencapai 100% tetapi pada tahun 2017 mengalami naik dan penurunan setiap tahunnya dari total presentase pada tahun 2015 71,00% naik pada tahun 2016 93,22%, terdapat penurunan sebesar 8,21%. Walaupun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,22%, dan total menjadi sebesar 93,22% tetapi penyerapan anggaran pada tahun 2016 masih lebih besar dibandingkan pada tahun 2017.

Penyusunan dan penggunaan anggaran disini terlihat belum optimal. Hal ini dapat terlihat berdasarkan pencapaian program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan artinya kinerja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi masih belum optimal. Adapun realisasi anggaran perprogram yang dapat disajikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2015 tabel 1.2 sebagai beriku;

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2015

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	4.531.600.000	3.425.978.744	94,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	93.818.000	120.675.000	99,21
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	8.598.442.000	5.323.203.249	58,34
Total	13.223.860.000	9.388.403.149	71,00

Sumber : LAKIP Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 94,48 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 99,21 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 58,34 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PSPA paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS secara keseluruhan adalah sebesar 71,00 persen dari total pagu.

Sementara realisasi anggaran belanja perprogram kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2016

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS (DMPTTL)	4.715.393.000	4.462.462.661	94,74
Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	4.715.393.000	155.900.000	69,44
Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	29.322.855.000	27.314.055.170	93,16
Total	34.262.748.000	31.932.417.831	93,22

Sumber : LAKIP Tahun 2015-2017

Berdasarkan Tabel di atas realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 94,74 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 69,44 persen dari pagu anggaran program PSPA; realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 93,16 persen dari pagu anggaran program, PPIS adalah jumlah persentase yang sangat kecil dan DMPTTL merupakan anggaran terbesar, dan persentase keseluruhan dari program adalah sebesar 93,22 persen dari total pagu.

Perbandingan selanjutnya realisasi anggaran belanja perprogram kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2017

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	5.274.502.000	4.468.632.118	84,72

Lainnya BPS (DMPTTL)			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	218.360.000	210.857.770	96,56
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	3.087.728.000	2.614.647.079	84,68
Total	8.580.590.000	7.294.136.967	85,01

Sumber : LAKIP Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 84,72 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 96,56 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 84,68 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program P SPA paling kecil diantara program yang lainnya, karena adanya *selfblocking* dan revisi antar satker di BPS sedangkan penyerapan program DMPTTL paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bekasi secara keseluruhan adalah sebesar 85,01 persen dari total pagu.

Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki anggaran untuk membuat suatu perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang dipakai sebagai dasar dalam mengendalikan aktivitas operasinya, maka anggaran menjadi patokan sebagai alokasi sumber daya (keuangan) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat

dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah direncanakan telah terserap dengan baik terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Hal ini juga berlaku di pemerintahan Kabupaten Bekasi khususnya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2012) proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Lemahnya perencanaan anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak tertumpuk di akhir tahun anggaran. Perencanaan juga merupakan daya serap sangat berpengaruh terhadap Anggaran secara tidak langsung perencanaan merupakan unsur penting didalam organisasi, dan aktivitas rancangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan, dan korelasi dengan anggaran dalam merealisasikan perencanaan itu kita membutuhkan anggaran, anggaran disini merupakan alat yang amat sangat penting dalam suatu perencanaan bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran.

Dari beberapa yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran yang masih sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Khususnya pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempengaruhi penyerapan anggarann masih rendah yang mengakibatkan mendapat raport merah, yaitu dengan serapan anggaran yang

masih dibawah 90%.. selain dari perencanaan anggaran yang mempengaruhi lemahnya penyerapan anggaran, ada juga anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Fenomena anggaran yang kurang terserap diawal tahun, namun dipaksakan serapannya pada akhir tahun kerap terjadi. Hal ini menjadi bahasan menarik karena serapan anggaran. Bekasi secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan diawal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan publik. Serapan anggaran yang rendah tentunya berimplikasi buruk terhadap kinerja suatu Pemerintah .

Dari berbagai penelitian terdahulu terlihat ada beberapa faktor permasalahan rendahnya serapan anggaran. Pertama, adanya ketidak pahaman atau ketakutan yang berlebihan mengenai perencanaan anggaran dari masing-masing aparatur diberbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Kedua, sejumlah institusi banyak yang tidak memiliki konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Ketiga, kurangnya pemahaman aparatur diberbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggung jawabannya. Dalam hal ini untuk Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi serapan harus mampu mengoptimalkan semua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan baik. Pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang dapat merealisasikan seluruh anggaran dengan efektif serta efisien bagi kesejahteraan masyarakat .

Semakin besar rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

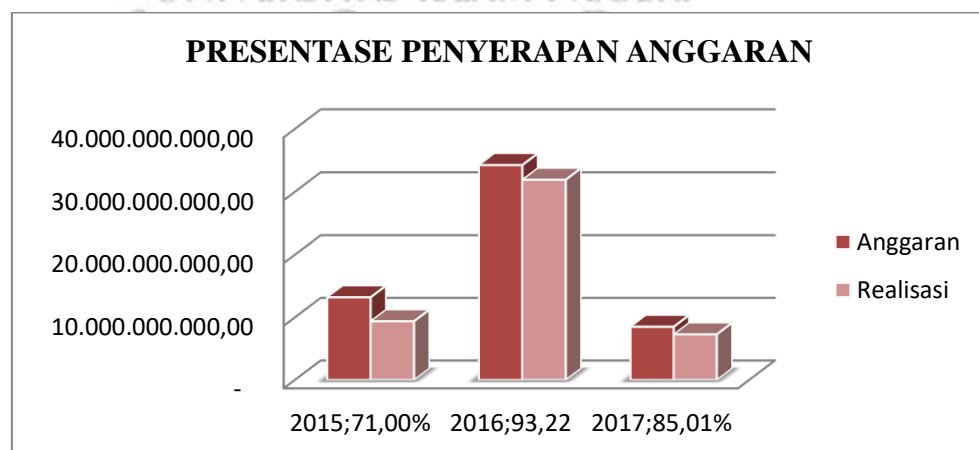
tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Pedoman Penilaian Efektifitas Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Berdasarkan keputusan Mendagri terlihat jelas dari data yang ada diatas secara keseluruhan dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum efektif. Dan walaupun baiknya kenaikan di satu tahun silang, tetap ketiga tahun penyerapan anggaran yang masih amat rendah, kurang dari 95%



Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2017

Grafik 1.2 merupakan presentase dari penyerapan anggaran belanja langsung Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung mulai dari tahun 2015 – 2017. Terlihat sekali anggaran dan realisasi penyerapan anggaran oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi yang masih belum mencapai 100 % dalam 3 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Judul yang diangkat peneliti sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah **“PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BEKASI”**

1.2 Identifikasi Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitiannya yaitu:

1. Belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan anggaran, karena masih banyak kegiatan perprogram yang belum terserap dengan baik yang masih dibawah 95% dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2015.
2. Realisasi hasil penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Realisasi hasil penyerapan anggaran pada tahun 2015, 2016, dan 2017 presentase penyerapannya masih naik turun.

4. Realisasi penyerapan anggaran yang rendah berimplikasi buruk terhadap kinerja suatu pemerintah.
5. Kegagalan akan target penyerapan anggaran ini menyebabkan hilangnya manfaat belanja.
6. Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini dapat terlihat berdasarkan pencapaian program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan artinya kinerja pada Badan Pusat Statistik belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil penulis, dapat disusun secara spesifik ke dalam pertanyaan (*Research Question*) sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi?
2. Seberapa besar pengaruh modal anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi?
3. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran dan modal anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap langkah atau tindakan yang terencana mempunyai tujuan, demikian dengan penelitian yang penulis lakukan ini juga mempunyai tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh modal anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran dan modal anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut: Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.

1.5.1 Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambahnya ilmu pengetahuan bagi kita dalam keilmuan khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan dan perencanaan anggaran yang dimana kedua teori tersebut berdasarkan referensi yang relevan.

1.5.2 Praktis

1. Diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran sehingga apa yang menjadi tujuan Badan Pusat Statistik akan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2. Mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi..

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Bastian (2006:78) Keuangan Negara adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintah.

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan atau aset berupa uang atau sesuatu yang dapat dinilai oleh uang yang dihimpun dan ada dalam administrasi kas negara yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara atau pemerintah baik yang ada dalam kas negara secara fisik maupun yang sudah beredar di masyarakat (Efendi, 2017:5)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, (Mardiasmo, 2009:61). Secara teoritis, anggaran merupakan manajerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan sasaran strategis. Begitu juga dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi publik, yaitu persediaan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, proses penganggaran pada sektor publik dimulai ketika proses perumusan strategi dan perencanaan strategis dilakukan. Perencanaan strategis ini yang akan

menentukan kualitas anggaran dan ketercapaiannya serta dampak dari pelaksana anggaran tersebut terhadap kepuasan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan anggaran menurut Halim (2014:84) adalah realisasi dari anggaran, secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu, maka penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran pada saat tertentu. Atau secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan secara sederhana yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya.

Membahas tentang anggaran harus diawali dengan perencanaan. Apabila perencanaan bisa dijalankan secara teratur, maka tidak akan timbul permasalahan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan baik di kementerian maupun di daerah. Salah satunya adalah pengendalian periodik yang kurang tepat sehingga apa yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (BPKP, 2012).

Menurut Bastian (2005: 86) dimensi yang dapat diambil dari perencanaan dan penganggaran keuangan adalah:

1. Perencanaan Keuangan
Perencanaan keuangan ini masih berhubungan dengan proses penilaian investasi. Tujuan dasar dari perencanaan keuangan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi sektor publik dan juga untuk memenuhi permintaan pelayanan yang ditetapkan pada saat perencanaan awal. Contohnya adalah survei kependudukan, kebutuhan dasar, dan kebutuhan sekunder pendidikan.
2. Anggaran Modal

Anggaran modal ini berisi rincian dan prakiraan penerimaan dari penjualan aset dan pembayaran pengambil alihan aset baru untuk perencanaan jangka menengah, sedangkan untuk jangka panjang, mempertimbangkan informasi kebutuhan tentang aset yang perlu diganti atau aset yang baru dibeli.

Menurut Effendie (2017: 236) Perencanaan anggaran adalah suatu proses dalam rangka merencanakan atau menyusun berbagai kegiatan atau program pembangunan secara komprehensif yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada masa yang akan datang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat dan dibiayai oleh dana yang disediakan oleh negara atau pemerintah sehingga dapat dicapai tujuan nasional secara optimal.

Menurut Majid (2009: 18), perencanaan memiliki dimensi sebagai berikut:

- a. Signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada tujuan yang diajukan dan signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun selama proses perencanaan.
- b. Fleksibilitas. Perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realitas baik yang berkaitan dengan biaya maupun implementasinya.
- c. Relevansi. Relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan secara optimal.
- d. Kepastian. Kepastian minimum diharapkan agar dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga.
- e. Ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan disusun dalam bentuk yang sederhana serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen.
- f. Adaptabilitas. Bahwa perencanaan bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau adaptable dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.

- g. Waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan juga dan reabilitasi analisa yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan dengan masa mendatang.

Menurut Halim (2014: 84) penyerapan anggaran adalah penyerapan dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu realisasi dari anggaran.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut Priatno (2013) adalah faktor administrasi dan SDM, perencanaan, dan pengadaan barang dan jasa.

1. Administrasi dan SDM, yang baik dan terorganisir akan membantu penyerapan anggaran yang lebih baik.
2. Perencanaan juga seringkali mengganggu penyerapan anggaran.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran, seringkali terjadi mutasi pejabat pengelola keuangan, serta seringkali terabaikan jadwal perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.

3. Dari segi pengadaan barang dan jasa, hal yang sering menjadi kendala yaitu kurangnya kemauan pegawai untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa yang disebabkan besarnya tanggungjawab dan resiko yang ditanggung menjadi salah satu penyebab. Selanjutnya besarnya intervensi dari atasan membuat panitia kurang leluasa dalam menjalankan tugas (Priatno, 2013)

Menurut Muhsin (2014:91) ada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, yaitu:

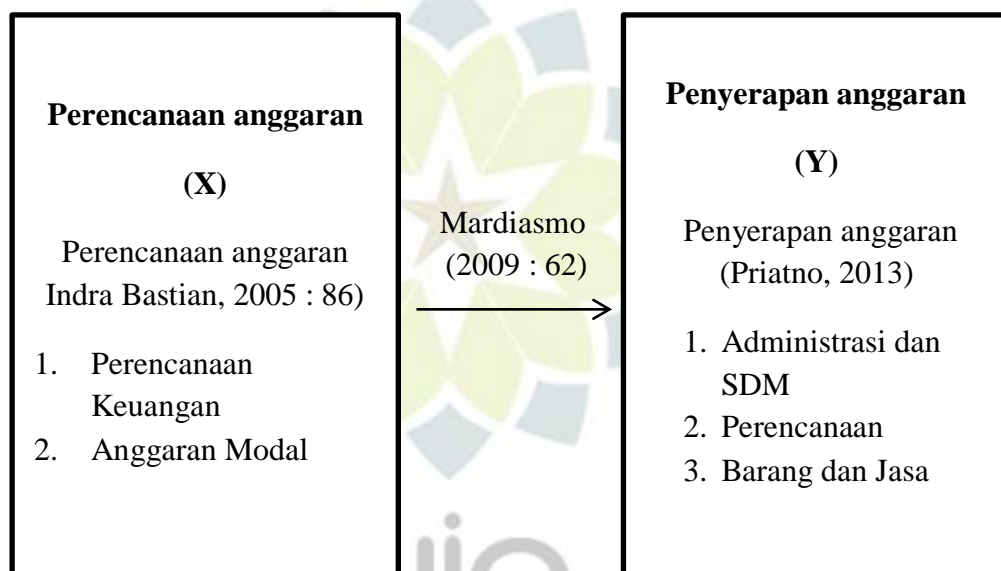
- a. Lemahnya perencanaan anggaran
Rendahnya penyerapan anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak tertumpuk di akhir tahun anggaran.
- b. Lemahnya proses pembahasan anggaran
Lemahnya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik ulur kepentingan. Seharusnya pembahasan anggaran sudah memiliki akumulasi anggaran sampai dengan bulan Desember, sehingga bulan Januari berikutnya pemerintahan daerah sudah siap melaksanakan program yang telah disepakati.
- c. Lemahnya proses tender
Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Aturan terkini tentang pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sebelumnya ada keputusan presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang.
- d. Ketakutan menggunakan anggaran
Banyaknya kasus yang melibatkan kepala daerah, pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga membuat mereka takut dalam merealisasikan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi stagnan. Beberapa pemerintah daerah menempatkan dana yang menganggur tersebut dalam Bank pembangunan Daerah (BPD) di lain pihak banyak proyek infrastruktur yang seharusnya segera didanai agar nanti para calon investor tertarik berinvestasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa rencana anggaran merupakan salah satu langkah perihal yang penting

dalam pengelolaan anggaran yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3 Kerangka Penelitian



1.7 Hipotesis

Menurut Silalahi (2014:266) menjelaskan Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dipertanyakan. Pernyataan-pernyataan tentang hubungan tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoritikal. Pernyataan hubungan antara variabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu masalah.

Dengan demikian penulis menggunakan Hipotesis Asosiatif. Menurut Silalahi (2014:274) bahwa, “Hipotesis Asosiasional adalah pernyataan yang menduga suatu hubungan antara variabel dengan variabel lain”.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis asosiatif sebagai berikut:

Berdasarkan asumsi diatas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. $H_0 : \rho \neq 0$, hipotesis nol, Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
 $H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif, Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
2. $H_0 : \rho \neq 0$, hipotesis nol, Anggaran modal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi
 $H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif, Anggaran modal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi
3. $H_0 : \rho \neq 0$, hipotesis nol, Perencanaan anggaran dan anggaran modal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi
 $H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif, Perencanaan anggaran dan anggaran modal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.